



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2017**



**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

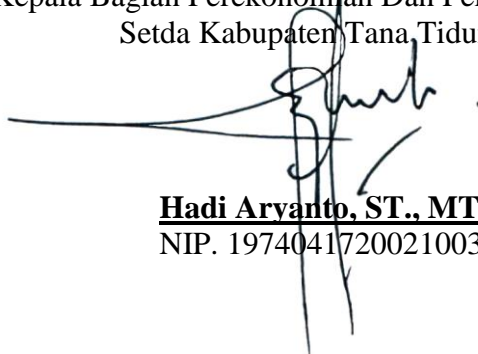
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**. Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2017 berarti Bagian Perekonomian Dan Pembangunan telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2016-2021 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung dalam upaya memenuhi visi dan misi Kepala Daerah. Selama tahun 2017, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai.

Capaian kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami agar dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kondisi lokal dan kepentingan nasional untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017.

Tideng Pale, 15 Januari 2018
Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan
Setda Kabupaten Tana Tidung



Hadi Aryanto, ST., MT
NIP. 1974041720021003



DAFTARI SI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP2

1.3 Tujuan3

1.4 Tugas Pokok.....3

1.5 Isu-Isu Strategis7

1.6 Sistematika Penulisan7

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja9

2.2 Indikator Kinerja.....10

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....11

3.2 Realisasi Anggaran.....12

3.3 Analisis Capaian Kinerja.....12

IV. PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LAKIP tahun 2017 dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dinyatakan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Penyusunan dokumen LAKIP Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 didasarkan pada :

- a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;



- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016-2021;

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

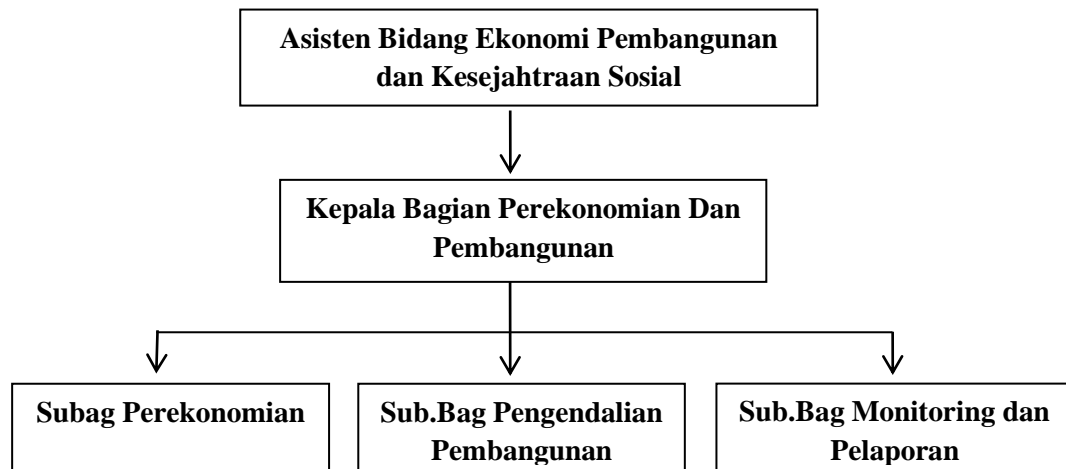
1.4 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Perekonomian dan Pembangunan memiliki 3 sub bagian, sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perekonomian
- b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
- c. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan



Gambar. 1
Bagan Struktur Organisasi Bagian Perekonomian Dan Pembangunan



Bagian Bagian Perekonomian Dan Pembangunan mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

- a. Membantu tugas Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum dalam melaksanakan tugas dibidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun dan merencanakan program, monitoring dan pembangunan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, transportasi, industri dan perdagangan, kepariwisataan, perusahaan daerah dan perbankan;
- e. Menyusun dan menyiapkan pedoman pembinaan dan petunjuk teknis dibidang peningkatan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan dan energi serta pariwisata serta transportasi dan komunikasi;
- f. Menyusun dan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perkoperasian, perkreditan dan permodalan serta investasi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Melaksanakan pengadministrasian program bantuan pembangunan dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga;
- h. Melaksanakan analisis dan menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pengendalian administrasi pembangunan;
- j. Melaporkan hasil kegiatan serta memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum, yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, pembangunan dan Umum dan Protokol dalam rangka pengambilan keputusan/strategi kebijakan daerah;

- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun uraian tugas berdasarkan sub bagian Perekonomian Dan Pembangunan sebagai berikut;

I. Sub Bagian Perekonomian

Uraian Tugas Sub Bagian Perekonomian meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Melaksanakan Pengumpulan bahan penyusunan kebijakan umum dan teknis dibidang perekonomian;
- d. Melaksanakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian;
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perekonomian;
- f. Melakukan inventarisasi dan pendataan sarana perekonomian;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibidang perekonomian;
- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan

Uraian tugas Sub Bagian Pengendalian Pembangunan meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Melaksanakan Pengumpulan Bahan Penyusunan kebijakan umum dan teknis pada bidang pengendalian pembangunan;
- d. Melaksanakan pembinaan, dan evaluasi berkenaan tentang pengendalian pembangunan;
- e. Melaksanakan koordinasi pengendalian pembangunan dengan instansi dan pihak yang terkait;
- f. Melakukan kejian pengendalian pembangunan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibidang pengendalian pembangunan;



- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan

Uraian Tugas Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan meliputi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Melaksanakan Pengumpulan Bahan Penyusunan kebijakan umum dan teknis dibidang monitoring dan pelaporan;
- d. Menghimpun, meneliti, menganalisa dan mengevaluasi hasil monitoring laporan pembangunan daerah;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dibidang monitoring dan pelaporan;
- f. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Tana Tidung, diperlukan sumber daya manusia dan sarana/ perlengkapan kantor yang memadai baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Saat ini, Bagian Perekonomian Dan Pembangunan memiliki 8 (delapan) orang PNS yang terdiri dari beberapa strata pendidikan dan golongan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1. Komposisi Pegawai berdasar Golongan/Pangkat

NO	GOLONGAN	Jumlah
1.	Golongan IV/a (Pembina)	1
2.	Golongan III/c (Penata)	3
3.	Golongan III/a (Penata Muda)	3
4.	Golongan II/a (Pengatur Muda)	1
	JUMLAH	8

Tabel 2. Komposisi Pegawai berdasar Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1.	Strata 2 (S-2)	1
2.	Strata 1 (S-1)	6
3.	S L T A	1
	JUMLAH	8

Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa secara kuantitas personil Bagian Perekonomian Dan Pembangunan masih sangat kekurangan atau sangat minim. Secara kualitas, meskipun dipengaruhi oleh jumlah yang kurang namun dikarenakan penerapan budaya *learning by doing* dan saling berbagi informasi dengan membangun komunikasi dan transfer pengetahuan, penyelenggaraan tugas pokok dan tugas kedinasan lainnya dapat berjalan baik.

1.5 Isu - Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Perekonomian Dan Pembangunan saat ini adalah kekurangan terhadap staf tenaga administrasi dan tekhnis sehingga dibutuhkan tambahan personil baru di Bagian Perekonomian Dan Pembangunan. Selain kurangnya personil/ staf, maka permasalahan yang lain adalah kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dimana pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan juga melekat kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

1.6 Sistematika Penulisan

Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 bab dengan susunan sebagai berikut :

- Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan menjabarkan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi bagian Perekonomian Dan pembangunan.
- Bab II – Perencanaan Kinerja, merupakan uraian ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2017 pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pencapaian kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta realisasi anggaran dalam mewujudkan kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Bagian Perekonomian Dan Pembangunan yang terdiri dari Sub Bagian Pengendalian Pembangunan, Sub Bagian Monitoring Dan Pelaporan dan Sub Bagian Perekonomian mempunyai strategi perencanaan yang digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan Bagian Pembangunan:

- a. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai tupoksinya masing-masing.
- b. Meningkatkan kualitas sistim informasi pembangunan dalam upaya mempercepat pengolahan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian masalah-masalah pelaksanaan pembangunan.
- c. Tersedianya petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik.
- d. Tersedianya pelayanan *procurement* unit/ Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- e. Tersedianya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.
- f. Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
- g. Pengendalian, dan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah.

Sasaran Bagian Pembangunan:

- a. Peningkatan realisasi program pembangunan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tana Tidung pada setiap akhir tahun anggaran berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih baik.
- b. Terwujudnya mekanisme proses pengadaan Barang dan Jasa yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan Barang/ Jasa pemerintah (*Procurement Unit*) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- d. Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan.
- e. Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Intensitas, Sinergitas dan Koordinasi yang dinamis antar SKPD bidang perekonomian dan pembangunan.

g. Stabilitas tingkat inflasi daerah.

Strategi dan Kebijakan Bagian perekonomian dan Pembangunan:

- a. Menyempurnakan mekanisme monitoring proyek pembangunan dan rapat koordinasi pengendalian pembangunan dengan SKPD.
- b. Mengoptimalkan seluruh personil Bagian perekonomian dan Pembangunan dengan meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja sesuai dengan tugas yang dibebankan pada Bagian perekonomian dan Pembangunan.
- c. Meningkatkan kinerja kelembagaan ULP dan LPSE sebagai penyelenggara dan panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
- d. Mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta SKPD secara komprehensif.

2.2. Indikator Kinerja Tahun 2017

Tabel 3. Indikator Kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD Kabupaten Tana Tidung	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	80%
		Jumlah OPD dengan tingkat penyerapan anggarannya diatas 80%	30 OPD
2.	Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	30 OPD
3.	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE	115 Paket
		Jumlah pengguna (Penyedia) layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Tidung	500 Penyedia
		Jumlah Aparatur Bagian Perekonomian & Pembangunan yang memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang dan Jasa	8 Orang
4.	Tercapainya Stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Tana Tidung	Persentase Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Tan Tidung Tahun 2017	1,5%



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian yang diperoleh sebagai pelaksanaan kegiatan (realisasi) dari hasil pengukuran kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi kegiatan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2017. Capaian kinerja diindikasikan dengan capaian indikator kinerja yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Tabel 4. Capaian Kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD Kabupaten Tana Tidung	Persentase realisasi keuangan dan fisik penyerapan dana APBD	85%	84,11%	98%
		Jumlah OPD dengan tingkat penyerapan anggarannya diatas 80%	30 OPD	28 OPD	93%
2.	Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah OPD yang menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	30 OPD	30 OPD	100%
3.	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Jumlah Paket Pengadaan yang di Lelang Melalui ULP dan LPSE	115 Paket	115 Paket	100%
		Jumlah pengguna (Penyedia) layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Tidung	500 Penyedia	460 Penyedia	92%
		Jumlah Aparatur Bagian Perekonomian & Pembangunan yang memiliki sertifikat ahli Pengadaan Barang dan Jasa	8 Orang	4 Orang	50%
4.	Tercapainya Stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Tana Tidung	Persentase Indek Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Tan Tidung tahun 2017	1,5%	1,5%	100%



3.2. Realisasi Anggaran

Adapun analisis capaian keuangan berdasarkan sasaran strategis dan program / kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Anggaran Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
2	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	837.575.000,00	806.631.100,00	96,31
		Infrastruktur LPSE	752.525.000,00	734.531.100,00	97,61
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	85.050.000,00	72.100.000,00	84,77
3	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	102.000.000,00	96.937.900,00	95,04
		Pendidikan dan pelatihan formal	102.000.000,00	96.937.900,00	95,04
4	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD Kabupaten Tana Tidung	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.245.150.000,00	1.139.731.000,00	91,53
		Rapat Koordinasi dan Pengendalian (RAKORDAL)	78.600.000,00	78.000.000,00	99,24
	Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.166.550.000,00	1.061.731.000,00	91,01
5	Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Program Pendukung Administrasi Pemerintahan	1.531.535.000,00	1.503.027.100,00	98,14
		Unit Layanan Pengadaan (ULP)	1.531.535.000,00	1.503.027.100,00	98,14
6	Tercapainya Stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Tana Tidung	Program pengembangan data/informasi	337.150.000,00	328.900.000,00	97,55
		Penyusunan dan pengumpulan data statistik Daerah	337.150.000,00	328.900.000,00	97,55

3.3. Analisis Capaian Kinerja

a. Sasaran I : Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dari Dana APBD Kabupaten Tana Tidung

- Pada tahun anggaran 2017 Kabupaten Tana Tidung memiliki anggaran APBD sebesar Rp. 986.735.958.995,71, dengan alokasi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 273.842.813.433,00, dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 556.061.672.886,01. Adapun tingkat serapan anggaran pada masing-masing alokasi yaitu BTL sebesar 90,15% dan BL sebesar 81,42%. Tidak tercapainya target (85%) penyerapan APBD Kabupaten Tana Tidung disebabkan adanya belanja infrastruktur yang belum terlaksana pada tahun 2017, khususnya yang telah direncanakan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).
- Selain belanja infrastruktur, maka penyebab tidak tercapainya target serapan anggaran APBD Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 adalah beberapa OPD yang



belum maksimal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA khususnya dalam hal belanja barang dan jasa. Adapun OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran dibawah $\leq 80\%$ yaitu; Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan , serta Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Sasaran II : Terlaksananya sistem pelaporan yang tepat waktu dengan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

- Sejak pertama kali diterapkannya Sistem Informasi Monitoring Dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD) tahun 2017, maka praktis proses pelaporan kegiatan-kegiatan OPD dilakukan secara online, sehingga akurasi dan validasi data dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Proses pelaporan dilakukan rutin setiap bulan oleh seluruh OPD Kabupaten Tana Tidung. Proses Pemantauan dan pengendalian berbasis web tersebut diharapkan mampu menjadi media yang tepat dalam mewujudkan percepatan pembangunan Kabupaten Tana Tidung.

c. Sasaran III : Terselenggaranya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel

- Capaian jumlah paket pengadaan yang di lelang melalui ULP dan LPSE adalah sebesar 100%, hal ini dikarenakan kelembagaan ULP dan LPSE selalu konsisten dalam menjalankan tupoksinya. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan tersebut adalah dengan penataan kelembagaan, peningkatan SDM aparatur, dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa.
- Semakin kompleksnya pelaksanaan barang/jasa pemerintah daerah maka peningkatan layanan pengadaan (e-procurement) juga perlu dilakukan agar penyedia barang dan jasa dapat berpartisipasi dengan mudah. Pada tahun 2017 jumlah penyedia yang terdaftar pada LPSE dan berpartisipasi pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah berjumlah 460 penyedia dengan tingkat capaian target sebesar 92%. Capaian positif tersebut tidak terlepas dari upaya LPSE dalam mensosialisasikan dan mengkoordinasikan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Salah satu upaya Bagian Perekonomian dan Pembangunan dalam meningkatkan kualitas LPSE adalah dengan meningkatkan SDM aparatur, baik Tim LPSE maupun Tim ULP. Aparatur tim LPSE belum sepenuhnya memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan dari 8 orang PNS hanya 4 orang yang telah lulus ujian sertifikasi, sehingga masih perlu untuk mengikuti Bimtek selanjutnya.

d. Sasaran IV : Tercapainya Stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Tana Tidung

- Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan Indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Stabilitas harga barang jasa di kabupaten tana tidung tahun 2017 masih relative stabil khususnya kebutuhan primer masyarakat seperti sembako, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan di lapangan, harga barang-barang pada pusat-pusat ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh biaya distribusi.

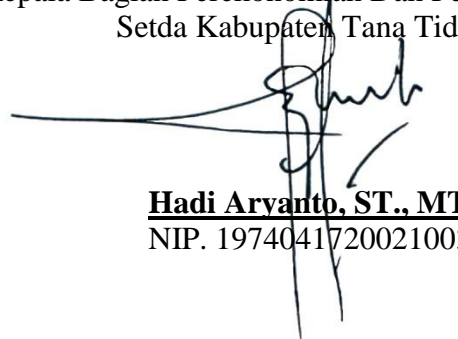
BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja Bagian Pembangunan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, 15 Januari 2018
Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan
Setda Kabupaten Tana Tidung



Hadi Aryanto, ST., MT
NIP. 1974041720021003